

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative governance in theory and practice." *Journal of public administration research and theory* 18, no. 4 (2008): 543-571.
- Anzela, Amanda Ibel. "Diplomasi Komersial Indonesia: Studi Kasus 5 Destinasi Super Prioritas Tahun 2019-2022." *Jurnal Pena Wimaya* 3, no. 2 (2023).
- Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata Desember 2023", diakses pada 28 Maret 2024.
- Bhakti, S. A. S. B., & Pramezwary, A. (2024). Strategi Pengembangan Borobudur Highland melalui Model Bisnis Kanvas dan Inovasi Wisata untuk Menarik Minat Berkunjung Wisatawan. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 60-72.
- Bodin, Örjan. "Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social-ecological systems." *Science* 357, no. 6352 (2017): ean1114.
- Bryson, John M., Barbara C. Crosby, and Melissa Middleton Stone. "The design and implementation of Cross-Sector collaborations: Propositions from the literature." *Public administration review* 66 (2006): 44-55.
- Burgos, Andrés, and Frédéric Mertens. "Collaborative governance networks: exploring governance success in large-scale conservation." *Ambiente & Sociedade* 25 (2022): e0110.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 80.
- Darmawan, Fahrurrozy. "Konservasi vs Pariwisata Massal: Konflik Kebijakan dan Tantangan Borobudur sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO." *Jurnal Vokasi Indonesia* 10, no. 1 (2022): 3.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo,
<https://www.dinpar.kulonprogokab.go.id/kadinas-pariwisata-kulon-progo-sampaikan-pentingnya-sinergitas-antar-kawasan-penyangga-destinasi-super-prioritas-candi-borobudur.html>, diakses pada 20 Juli 2024.

Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. "An integrative framework for collaborative governance." *Journal of public administration research and theory* 22, no. 1 (2012): 1-29.

Hadjon. Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hall, C. Michael. "A typology of governance and its implications for tourism policy analysis." In *Tourism governance*, pp. 27-47. Routledge, 2013.

Hidayah, Nurdin. *Pemasaran Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Era Digital: Targeting, Positioning, Branding, Selling, Marketing Mix, Internet Marketing*. Kreasi Cendekia Pustaka, 2021.

Junida, A. E., 2017, "Badan Otorita Pariwisata Borobudur Diresmikan", <https://www.antaranews.com/berita/641257/badan-otoritapariwisata-borobudur-diresmikan>, Diakses pada 5 Juli 2024.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Berkenalan dengan 5 Destinasi Super Prioritas", <https://info5dsp.kemenparekraf.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Mengenal 10 Destinasi Prioritas Pariwisata Indonesia", <https://kemenparekraf.go.id/rumah-difabel/Mengenal-10-Destinasi-Prioritas-Pariwisata-Indonesia>, diakses 11 Februari 2024.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Perguruan Tinggi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia V", diakses pada 20 Juli 2024.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya.

Kristianto, 2020, *Persepsi Stakeholder di Kawasan Pariwisata Borobudur mengenai Fungsi Koordinatif Badan Otorita Borobudur*, Skripsi, Program Studi S1 Manajemen Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kuswaraharja, Dadan., “*Borobudur Bakal Punya Badan Layanan Umum*”, Detik.com., <https://travel.detik.com/travel-news/d-5815399/borobudur-bakal-punya-badan-layanan-umum> ,diakses pada 20 Juli 2024.

Laporan Kinerja Badan Otorita Borobudur Tahun 2023.

Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 7.

McNamara, Madeleine. "Starting to untangle the web of cooperation, coordination, and collaboration: A framework for public managers." *International Journal of Public Administration* 35, no. 6 (2012): 389-401.

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, *Remaja Rosda Karya*, 2001, Hal 4.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan metodologi penelitian hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189-206.

Natalia, Fransisca., “*Final, Badan Otorita Borobudur Berubah Bentuk Jadi BLU*”, <https://www.kompas.tv/bisnis/176422/final-badan-otorita-borobudur-berubah-bentuk-jadi-blu> ,diakses pada 20 Juli 2024.

Nyaupane G.P dan D.J. Timothy, “*A Regional Perspective, Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility Series, Oxon*” (Paper presented at Seminar *Cultural Heritage and Tourism In The Developing World*, 2009).

Patadjenu, Syahrifan. "Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara." PhD diss., Politeknik STIA LAN Jakarta, 2023.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Otorita Borobudur.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rekayasa Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Borobudur.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84).

Perjanjian Kinerja Badan Otorita Borobudur Tahun Anggaran 2023.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), hlm. 32.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, hal 78.

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hal 27.

Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada, "Pengembangan Kepariwisata", <https://psppr.ugm.ac.id/2023/08/25/pengembangan-kepariwisataan>, diakses pada 20 Maret 2024.

Rencana Strategis Badan Otorita Borobudur Tahun 2023.

Rhodes, R. A. W. (1996). *The New Governance: Governing without Government. Political Studies*, 44(4), 652–667. doi:10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x.

Salukh, Jelianti Yunita, David BW Pandie, and Apriana HJ Fanggidae. "Analisis Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Super Prioritas Berkelanjutan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2023).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), hlm. 48.

Sripun, Mattara, Sekson Yongvanit, and Richard Pratt. "Power, legitimacy, and urgency of community-based tourism stakeholders in northeastern Thailand." *Asian Social Science* 13, no. 4 (2017): 104.

Suryabrata, Sumadi., Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Utami, Dea Vania. "Tinjauan Hukum Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama Yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur Dengan Badan Usaha Dan Lembaga Atau Pihak Terkait." *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 8, No. 2 (2022): 106-118.

Voets, Joris, Taco Brandsen, Christopher Koliba, and Bram Verschuere. "Collaborative governance." In *Oxford research encyclopedia of politics*. Oxford University Press, 2021.

Wawancara dengan Direktorat Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 18 Juli 2024.

Wawancara dengan Kepala Divisi Keuangan dan Kepala Divisi Hukum Badan Otorita Borobudur, 26 Juli 2024.

Wibowo, G. D. H. (2009). Aspek Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 127-144.